

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER PADA KINERJA KEUANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO

Putri Nurhaliza Hartono

NPP. 31.0911

Asdaf Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

Program Studi Keuangan Publik

Email: putrinurhalizahartono7@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Dedeh Maryani, MM

ABSTRACT

Problem/ Background (GAP): A region's ability to manage its finances can be measured by how much Original Regional Income (PAD) they manage to obtain. PAD is the main indicator in determining how dependent a region is on other sources of income. The greater the PAD, the lower the level of dependence of the area on income from other sources. **Purpose :** This research aims to analyze regional financial performance, especially the independence ratio and dependency ratio of Bone Bolango Regency by considering Original Regional Income (PAD) and Transfer Funds, as well as to identify factors that influence the financial performance of the local Regional Government. **Metode :** The approach used is descriptive qualitative to describe the financial performance of Bone Bolango district. **Result :** The research results show that the financial independence of Bone Bolango Regency is still low, with the central government playing an important role in the region's financial contribution. Even though there has been an increase in Original Regional Income from year to year, it still does not meet the set standards, indicating dependence on transfer funds from the central government. The financial effectiveness ratio shows from 2020 to 2022, with a significant increase in 2022. However, the efficiency ratio tends to be less efficient, indicating that the financial performance of the Regional Government of Bone Bolango Regency needs to be improved. Factors inhibiting financial performance include regional taxes and levies which are not yet optimal. , regional potential has not been utilized optimally, as well as dependence on transfer funds. Meanwhile, supporting factors include the Bone Bolango Regency Government's policy regarding the collection of Original Regional Income which seeks to increase the Regency's Original Regional Income. **Conclusion :** Thus, this research provides a deeper understanding of the regional financial performance of Bone Bolango Regency and the factors that influence it, as well as providing a basis for improving more effective policies in regional financial management.

Keywords: PAD, Transfer Funds, Independence, Dependency, Effectiveness, Efficiency, Degree of Decentralization

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya dapat dinilai dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil mereka peroleh. PAD menjadi indikator utama dalam menentukan seberapa bergantungnya suatu daerah terhadap sumber pendapatan lain. Semakin besar PAD, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap pendapatan dari sumber lain. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah terutama rasio kemandirian dan rasio ketergantungan Kabupaten Bone Bolango dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah setempat. **Metode :** Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kinerja keuangan kabupaten Bone Bolango. **Hasil :** penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Bone Bolango masih rendah, dengan Pemerintah pusat berperan penting dalam kontribusi keuangan daerah tersebut. Meskipun terjadi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, menunjukkan ketergantungan pada dana transfer dari Pemerintah pusat. Rasio efektivitas keuangan menunjukkan fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2022, dengan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Namun, rasio efisiensi cenderung kurang efisien, menandakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu diperbaiki. Faktor penghambat kinerja keuangan mencakup pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum optimal, belum dimanfaatkannya potensi daerah secara maksimal, serta ketergantungan terhadap dana transfer. Sementara faktor pendukung meliputi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terkait pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten tersebut. **Kesimpulan :** Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan daerah Kabupaten Bone Bolango dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah.

Kata kunci: *PAD, Dana Transfer, Kemandirian, Ketergantungan, Efektivitas, Efisiensi, Derajat Desentralisasi*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan yang tersedia guna mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah yang semakin diperkuat, aspek kinerja keuangan daerah menjadi lebih penting untuk diperhatikan. Kinerja keuangan daerah menjadi salah satu aspek krusial dalam mengukur efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan suatu wilayah.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya dapat dinilai dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil mereka peroleh. PAD menjadi indikator utama dalam menentukan seberapa bergantungnya suatu daerah terhadap sumber pendapatan lain. Semakin besar PAD, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap pendapatan dari sumber lain. Namun, berdasarkan data dari kementerian keuangan tingkat ketergantungan setiap daerah secara nasional terhadap dana transfer atau dana perimbangan pemerintah pusat masih sangat tinggi.

5 provinsi tersebut dikategorikan pendapatan terendah di Indonesia dibandingkan dengan pendapatan Provinsi DKI Jakarta yang jumlah pendapatan terbesar. DKI Jakarta dari tahun ke tahun selalu menjadi APBD terbesar se-Indonesia. Tahun 2019 mencapai Rp. 62,3 triliun. Pada tahun 2020 Rp. 55,8 triliun. Dan pada tahun 2021 mencapai Rp. 72,18 triliun. Seharusnya setiap daerah dapat mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Provinsi Gorontalo termasuk dalam 5 daerah dengan tingkat ketergantungan tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dengan persentase PAD hanya 27% dari total pendapatan daerahnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pendapatan daerah Bone Bolango tidak bisa dibandingkan dengan pengeluaran daerahnya, sehingga tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk membiayai daerahnya sendiri. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango masih tergolong di bawah angka ideal yang terlihat secara proporsional. PAD yang dihasilkan Kabupaten Bone Bolango telah masih kurang, meskipun terdapat banyak pembangunan di daerah tersebut, perhatian harus difokuskan pada kemandirian keuangannya. Pembangunan yang meningkat tidak menjamin bahwa keuangan daerah sudah mandiri, masih tergantung pada dana transfer dari pusat dan belum dapat dibiayai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli Daerah. Sebagai hasilnya, pembangunan hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Saat ini, Kabupaten Bone Bolango sedang mengalami banyak pembenahan. Namun, setelah diteliti laporan pelaksanaan anggaran, semua pembangunan yang terjadi sejauh ini tidak didanai oleh Pendapatan Asli Daerah, melainkan oleh Dana Transfer.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Erna Rahmawati dan I Wayan Putra, memiliki perbedaan yaitu pada lokus penelitian dan memiliki persamaan pada metode yang digunakan yaitu kualitatif. Dan persamaan juga terdapat fokus pada penelitian ini yaitu menganalisis rasio kinerja keuangan yakni menunjukkan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa sangat rendah, dengan efektivitas PAD dari tahun 2010 hingga 2012 yang kurang efektif. Efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa juga tergolong tidak efisien. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhan PAD menunjukkan peningkatan yang positif, dan proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki kontribusi paling besar dalam pendapatan daerah melalui Dana Perimbangan, sementara belanja daerah terbesar didukung oleh belanja tidak langsung. Rata-rata tingkat belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun anggaran 2010-2012 dapat dikatakan ekonomis. Penelitian kedua yang ditulis oleh Mega Oktavia Ropa tersebut memiliki perbedaan pada lokasi penelitian yang tentunya terdapat permasalahan yang berbeda. Persamaan terdapat pada kinerja keuangan yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektivitas dapat dianggap efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio

kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktivitas kurang optimal, dan rasio pertumbuhan baik untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, tetapi kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan analisis rasio keuangan, cukup baik. Penelitian selanjutnya oleh Ni Kadek Novia I. Putri, Ni Putu Ayu Darmayanti terdapat perbedaan pada metode penelitian yaitu menggunakan kuantitatif observasi non partisipan atas data kuantitatif dan pada fokus penelitian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan antara penelitian ini adalah topik pembahasan yang sama yaitu membahas kinerja keuangan. Penelitian berikutnya oleh Masita Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas memiliki perbedaan pada lokus penelitian dan persamaan terdapat pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dan fokus penelitian yaitu menganalisis rasio kinerja keuangan Hasil studi menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan tingkat kinerja keuangan daerah yang belum stabil atau kurang baik. Perhitungan tahunan menunjukkan fluktuasi angka untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian selanjutnya oleh Joice Mahmud, Lukfiah Irwan Radjak memiliki perbedaan pada metode yang digunakan yaitu kuantitatif serta perbedaan pada teori yang digunakan ialah Regresi Linier Berganda dan persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan datang adalah persamaan dalam fokus penelitian yaitu kinerja keuangan dan terletak pada penentuan lokus dan analisis rasio untuk pengukuran kinerja keuangan tidak hanya menggunakan rasio efisiensi belanja. Berikutnya penelitian oleh Fathiyah dan Masnun terdapat perbedaan pada lokus penelitian Persamaan antara kedua hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, yang diukur dengan rasio likuiditas, solvabilitas, dan leverage, masih tergolong baik dan dalam batas aman karena semua rasio nilainya berada di atas standar industri. Meskipun demikian, pada tahun 2015 terjadi penurunan nilai pada semua rasio karena Pemerintah Provinsi Jambi mulai menerapkan basis akural dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini menyebabkan penurunan pada pos aset, baik pos aset lancar akibat penyisihan piutang maupun pos aset tetap akibat penyusutan. Penurunan nilai aset secara otomatis mengakibatkan penurunan kinerja keuangannya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Analisis Pendapatan Asli daerah dan Dana Transfer pada Kinerja Keuangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah. Pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menambahkan rasio ketergantungan yang terdapat pada teori Mahmudi (2016).

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer di Kabupaten Bone Bolango.

II. METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, menguraikan dan membahas kinerja keuangan daerah kabupaten Bone Bolango. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, Sekretaris Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango, Kabid Perencanaan Anggaran, Kasubid Perencanaan Anggaran. Adapun pengumpulan data Kualitatif dilaksanakan dengan mewawancarai beberapa informan. Adapun analisisnya menggunakan teori kinerja keuangan yang digagas oleh Mahmudi (2016) yakni terdapat beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio ketrgantungan, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio derajat desentralisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Pada Kabupaten Bone Bolango, yaitu sebagai berikut :

3.1.1 Rasio Kemandirian

Dalam konteks ekonomi, rasio kemandirian dapat merujuk pada seberapa besar negara dapat memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri, seperti pangan, energi, atau teknologi, tanpa terlalu bergantung pada impor dari negara lain. Negara dengan tingkat kemandirian yang tinggi cenderung lebih stabil secara ekonomi dan memiliki lebih sedikit risiko yang terkait.

Dalam menghitung rasio kemandirian daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2022 maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango 2020-2022, yakni :

$$\text{Tahun 2020} = \frac{75.145.390.393}{851.547.950.341} \times 100 \% = 8,8\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{90.519.203.018}{889.339.280.129} \times 100 \% = 10,1\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{90.932.057.807,22}{760.778.508.094} \times 100 \% = 12\%$$

Berdasarkan Hasil perhitungan, menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.18 berikut:

Tabel 3.1

Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Daerah	Klasifikasi Kemandirian daerah
2020	75.145.390.393	851.547.950.341	8,8 %	Sangat Rendah
2021	90.519.203.018,79	889.339.280.129	10,1%	Sangat Rendah
2022	90.932.057.807,22	760.778.508.094	12%	Sangat Rendah

Sumber: BKPD Kabupaten Bone Bolango (Data Diolah Penulis, 2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data, pada tahun 2020, rasio kemandirian daerah Kabupaten Bone Bolango mencapai 8,8%, meningkat menjadi 10,1% pada tahun 2021, dan mencapai 12% pada tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, angka tersebut masih menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bone Bolango masih sangat rendah. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh Kabupaten Bone Bolango masih jauh lebih sedikit dibanding pendapatan yang berasal dari transfer pusat dan daerah.

3.1.2 Rasio Ketergantungan

Ketergantungan keuangan daerah bisa diukur dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

Perhitungan Rasio Ketergantungan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2022, sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2020} = \frac{851.547.950.341}{953.923.736.478} \times 100 \% = 89,2\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{889.339.280.129}{1.011.278.890.342} \times 100 \% = 87,9\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{760.778.508.094}{886.289.616.614,22} \times 100 \% = 85,8 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan penulis, diperoleh besarnya rasio ketergantungan daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020-2022 :

Tabel 3.2

Perhitungan Rasio Ketergantungan Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2022

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan	Kriteria Ketergantungan
2020	851.547.950.341	953.923.736.478	89,2%	Sangat Tinggi
2021	889.339.280.129	1,011,278,890,342	87,9%	Sangat Tinggi
2022	760.778.508.094	861.671.915.401	85,8%	Sangat Tinggi

Sumber: BKPD Kabupaten BoneBolango (Data Diolah Penulis, 2024)

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pada tahun 2020, rasio ketergantungan daerah Kabupaten Bone Bolango mencapai 89,2%, tahun 2021 turun menjadi 87,9%, dan tahun 2022 turun lagi menjadi 85,8%. Penurunan persentase ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan daerah tersebut menurun setiap tahunnya. Meskipun demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Bone Bolango tetap sangat tinggi. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Bone Bolango masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari transfer pusat dan daerah.

3.1.3 Rasio Efektivitas

Secara sistematis dapat di masukkan dalam rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2020} = \frac{75.145.390.393}{89.908.414.709} \times 100\% = 83,5\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{90.519.203.018,79}{113.087.605.912} \times 100\% = 80\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{90.932.057.807,22}{97.762.449.209,50} \times 100\% = 93\%$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan penulis, diperoleh besarnya rasio efektivitas Kabupaten Bone Bolango tahun 2020-2022 :

Tabel 3.3

Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2020	75.145.390.393	89,908,4az14,709	83,5%	Cukup Efektif

2021	90.519.203.018,79	113.087.605.912	80%	Cukup Efektif
2022	90.932.057.807,22	97.762.449.209,50	93%	Sangat Efektif

Sumber: BKPD Kabupaten Bone Bolango (Data Diolah Penulis, 2024)

Dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas pada tahun 2020-2022 Berdasarkan hasil pengolahan data, pada tahun 2020 rasio efektivitas Kabupaten Bone Bolango mencapai 83,5%, menurun menjadi 80% pada tahun 2021, dan naik lagi mencapai 93% pada tahun 2022. Dapat disimpulkan angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas keuangan daerah Kabupaten Bone Bolango sudah cukup efektif. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh Kabupaten Bone Bolango masih jauh lebih sedikit dibanding pendapatan yang berasal dari transfer pusat dan daerah.

3.1.4 Rasio Efisiensi

Perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2022 yakni :

$$\text{Tahun 2020} = \frac{955.340.258.355,20}{962.485.223.766,60} \times 100\% = 99,2\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{776.868.746.189,02}{1.011.278.890,342} \times 100\% = 76,8\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{776.963.401.190,40}{886.289.616.614,22} \times 100\% = 87,6\%$$

Tabel 3.4

Perhitungan Rasio Efisiensi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2020	955.340.258.355,20	962.485.223.766,60	99,2%	Kurang Efisien
2021	776.868.746.189,02	1.011.278.890,342	76,8%	Efisien
2022	776.963.401.190,40	886.289.616.614,22	87,6%	Cukup Efisien

Sumber: BKPD Kabupaten Bone Bolango (Data Diolah Penulis, 2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data, pada tahun 2020, hasil persentase rasio efisiensi menunjukkan angka 99,2% yaitu kurang efisien. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 76,8% dikategorikan efisien karena pendapatan daerah lebih tinggi dari belanja. Dan tahun 2022 menunjukkan angka 87,6% yang berarti efisien.

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan asli Daerah, PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitas nya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efektif.

3.1.5 Rasio Derajat Desentralisasi

Berikut untuk perhitungan atas rasio derajat desentralisasi:

$$\text{Tahun 2020} = \frac{75.145.390.393}{962.485.223.766,60} \times 100\% = 7,8\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{90.519.203.018,79}{1.011.278.890.342,79} \times 100\% = 8,9\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{90.932.057.807,22}{886.289.616.614,22} \times 100\% = 10,3\%$$

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan penulis, diperoleh besarnya rasio derajat desentralisasi daerah Kabupaten Bone Bolango tahun 2020-2022 :

Tabel 3.5

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2022

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio Derajat Desentralisasi	Kriteria Derajat Desentralisasi
2020	75.145.390.393	976.537.865.263,44	7,8%	Sangat Kurang
2021	90.519.203.018,79	1.011.278.890.342,79	8,9%	Sangat Kurang
2022	90.932.057.807,22	886.289.616.614,22	10,3%	Kurang

Sumber: BKPD Kabupaten Bone Bolango (Data Diolah Penulis, 2024)

Berdasarkan hasil pengolahan data, pada tahun 2020, hasil persentase derajat desentralisasi menunjukkan angka 7,8% sangat kurang. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 8,9% dikategorikan sangat kurang. Dan tahun 2022 menunjukkan angka 10,3%. Jadi derajat desentralisasi kabupaten Bone Bolango dikategorikan sangat kurang. Karena total pendapatan daerah lebih tinggi dari dari PAD.

3.2.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten Bone Bolango

Ada beberapa faktor-faktor yang mungkin menjadi pengaruh pada kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

3.2.2.1 Faktor Penghambat

Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penghambat kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

1. Keterbatasan Pendapatan, hal ini pendapatan asli daerah terbatas, akan sulit bagi kabupaten untuk melakukan investasi atau memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kabupaten Bone Bolango memiliki pendapatan asli daerah yang minim dan masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pusat, disebabkan oleh kurangnya kegiatan ekonomi yang berkembang, rendahnya pajak dan retribusi daerah, atau kurangnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Ketergantungan pada Dana Transfer: Jika kabupaten terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi, fluktuasi dalam transfer tersebut dapat mengganggu perencanaan keuangan daerah.

3. Ketidakstabilan Regulasi: Ketidakstabilan perubahan regulasi yang sering dapat menghambat perencanaan jangka panjang dan investasi. Menurut bapak Arief Wijaya, SE,M.AP selaku Kepala Bidang Perencanaan Anggaran mengungkapkan :

“Beberapa periode sebelumnya itu PAD meningkat walaupun tidak terlalu signifikan karena di atas 10% saja. itu maksudnya hal yang perlu effort dengan kerja keras karena dibatasi dengan aturan dengan undang undang pajak jadi ada beberapa pajak retribusi yang pemerintah daerah larang pungut ini hanya pemerintah pusat Haknya negara itu tinggal dimaksimalkan apa apa yang boleh di daerah dipungut begitu jadi dikembalikan ke kemandirian daerah Bone Bolango itu memang masih belum mandiri Walaupun maksudnya tiap tahun sangat berusaha meningkatkan PAD.”

4. Ketergantungan pada Utang,Penggunaan utang untuk membiayai proyek atau operasional rutin dapat menyebabkan beban bunga yang tinggi dan mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang.

3.2.2.2 Faktor Pendukung

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penulis akan mengeksplorasi faktor faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

1. Efisiensi Pengelolaan Keuangan, kinerja keuangan dapat ditingkatkan melalui efisiensi pengelolaan anggaran dan pengeluaran, pengendalian belanja dan pemantauan pengeluaran belanja.
2. Good Governance, penerapan prinsip akuntabilitas, akuntabilitas adalah kunci. Pemda yang akuntabel akan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan mereka kepada publik, lembaga pengawas, serta pihak-pihak yang terkait. Ini termasuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dan menjelaskan setiap keputusan keuangan yang diambil.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia, para pegawai Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan dapat membantu Pemda dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan yang akurat.

3.2.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Kinerja Keuangan Kabupaten Bone Bolango

1. Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah perlu mencari sumber-sumber pendapatan baru yang tidak hanya mengandalkan satu sektor saja. Contoh Upaya: Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan mempromosikan destinasi wisata lokal dan meningkatkan infrastruktur pariwisata. Mengoptimalkan Aset Daerah, Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan retribusi, seperti retribusi pasar, parkir, dan izin usaha.

2. Upaya Mengurangi Ketergantungan Dana Transfer

Ketergantungan dana transfer merupakan salah satu faktor penghambat kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) karena dapat mengurangi kemandirian dan inovasi dalam pengelolaan keuangan.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan dana transfer dan meningkatkan kinerja keuangan Pemda: Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Melakukan peningkatan efisiensi dan pelayanan dalam pengelolaan pajak dan retribusi, termasuk penggunaan teknologi untuk mempermudah proses administrasi dan pengawasan. Selain PAD, Peningkatan Efisiensi Pengeluaran: Meningkatkan efisiensi pengeluaran dengan melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pengembangan Usaha Bersama (Kerja Sama Antar Daerah): Melalui kerja sama antar daerah, Pemda dapat saling membantu dalam pengembangan ekonomi daerah, pertukaran pengalaman, serta sharing sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

3. Upaya Menyesuaikan Regulasi

Stabilisasi regulasi anggaran dapat menjadi langkah yang sangat penting. Hal ini Perencanaan yang terukur, pemda harus membuat rencana anggaran tahunan yang terukur dan realistis. Ini melibatkan identifikasi pendapatan yang dapat diandalkan serta estimasi pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Pemantauan dan evaluasi, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan rencana anggaran. Hal ini memungkinkan untuk menyesuaikan anggaran jika ada perubahan kondisi atau kebutuhan yang tidak terduga.

4. Upaya Mengatasi ketergantungan pada Utang

Ketergantungan pada utang dan meningkatkan kinerja keuangan Pemda memerlukan upaya lintas sektor yang komprehensif. Diperlukan kebijakan yang tepat dan konsisten, serta komitmen dari semua pihak terkait untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui upaya bersama dalam meningkatkan pendapatan, mengelola utang dengan bijak, dan meningkatkan efisiensi pengeluaran, Pemda dapat memperbaiki kinerja keuangan mereka dan mengurangi ketergantungan pada utang. Penghematan anggaran, Meningkatkan efisiensi pengeluaran dengan mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan serta memprioritaskan pengeluaran untuk program yang lebih penting. Evaluasi program juga harus dilakukan untuk memantau evaluasi terhadap program dan kegiatan yang tidak efektif atau tidak berdampak signifikan, kemudian mengalokasikan dana ke program yang lebih efektif.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango terutama dalam tingkat kemandirian daerah. Hal ini sama halnya dengan pernyataan penelitian Erna Rahmawati dan I Wayan Putra (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Sumbawa sangat rendah, dengan efektivitas PAD yang kurang efektif. Meskipun demikian, rata-rata pertumbuhan PAD menunjukkan peningkatan yang positif, dan proporsi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki kontribusi paling besar dalam pendapatan daerah melalui Dana Perimbangan.

Penulis menemukan temuan penting dalam penelitian ini yakni dari hasil rasio yang dirumuskan tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Bone Bolango terhadap Dana Transfer masih sangat tinggi sehingga masih kurangnya pengoptimalan pengelolaan sumber daya daerahnya.

Berbeda dengan pernyataan penelitian yang dinyatakan oleh Fathiyah dan Masnun (2017) Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, yang diukur dengan rasio likuiditas, solvabilitas, dan leverage, masih tergolong baik dan dalam batas aman karena semua rasio nilainya berada di atas standar industri. Meskipun demikian, pada tahun 2015 terjadi penurunan nilai pada semua rasio karena Pemerintah Provinsi Jambi mulai menerapkan basis akural dalam penyajian laporan keuangannya. Hal ini menyebabkan penurunan pada pos aset, baik pos aset lancar akibat penyisihan piutang maupun pos aset tetap akibat penyusutan. Penurunan nilai aset secara otomatis mengakibatkan penurunan kinerja keuangannya.

1V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis kinerja keuangan Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari:
 - Rasio Kemandirian, tingkat kemandirian Kabupaten Bone Bolango masih sangat rendah, Pemerintah pusat masih berperan penting dalam memberikan kontribusi bagi daerah tersebut. Meskipun pendapatan asli daerah Kabupaten Bone Bolango mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan.
 - Rasio Ketergantungan, ketergantungan pada transfer pusat cenderung bertambah tinggi seiring banyaknya kebutuhan daerah. Hal Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum mengoptimalkan sumber daya daerahnya, sehingga masih sangat bergantung.
 - Rasio efektivitas pada tahun 2020 adalah 83,5% ,tahun 2021 sebesar 80% dan tahun 2022 sebesar 93%. Dari hasil tersebut di tahun 2022 mengalami kenaikan rasio efektivitas yang bagus, yang menunjukkan kemampuan cukup efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerah.
 - Namun demikian, hasil rasio efisiensi dari tahun 2020 hingga 2022 cenderung kurang efisien, besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan daripada realisasi pendapatan yang diterima menandakan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kurang efisien.
 - Tingkat derajat desentralisasi selama tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango masih sangat kurang dalam kemampuan desentralisasinya. Kabupaten Bone Bolango masih membutuhkan pendapatan dari pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan daerahnya.
2. Faktor penghambat kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango antara lain adalah pemungutan pajak dan retribusi daerah yang belum optimal, belum dimanfaatkannya potensi daerah secara maksimal, serta ketergantungan terhadap dana transfer. Faktor pendukung kemampuan keuangan Kabupaten Bone Bolango adalah adanya efisiensi pengelola keuangan, penerapan good governance, dan pengembang sumber daya manusia.
3. Upaya dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango yaitu dengan melaksanakannya peningkatan pendapatan asli daerah, mengurangi ketergantungan dana transfer, menyesuaikan regulasi yang ada dan mengurangi ketergantungan penggunaan utang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan data yang digunakan masih kurang

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis kinerja keuangan dengan data yang lebih lengkap

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian yaitu Bapak dan Ibu selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah membimbing penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran, S. T. (2016). *Kinerja keuangan daerah, APBD, dan rasio keuangan*. 15, 1767–1795.
- Discussion, F. G., Nasional, A. Z., & Indonesia, W. (n.d.). *Kata Kunci: Strategi, Sumber Dana, Social, Kinerja Keuangan, BPRS*.
- Effect, F., Income, L., Zacharias, E. N., & Lambelanova, R. (2018). *Flypaper Effect Local Income and Block Grant to Local Expenditure and 54 Income in Kupang City East-South East Nusa Province Esteria Niviannny Zacharias, Rossy Lambelanova*. X, 54–67.
- Faculty, P. S., & Sumedang, K. (2023). *Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia Jl. Raya Bandung - Sumedang No.Km.20, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363*. 11(2), 389–409.
- Machmud, M., & Kawung, G. (2014). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2007-2012*. 14(2), 1–13.
- Sinurat, M., Sukma, R., Putri, S., Sinaga, W., Widowati, A., Sumedang, K., Barat, J., Labuhanbatu, P. K., Bandar, U., Utara, S., Agung, U. D., Petisah, K. M., Medan, K., & Utara, S. (n.d.). *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara*. 89–105.
- Systems, C. (2020). *Analysis of Financial Performance of Regional Governments in Indonesia : A Case Study in Bekasi City , 2015-2017*. 12(06), 2015–2017. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201251>
- Vol, B. (2017). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA BASIS AKRUAL TAHUN 2014 - 2015 Fathiyah 1 , Masnun 2*. 1(1), 70–77.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

